BAB I

GAMBAR UMUM PERUSAHAAN

1.1 Latar Belakang Proyek

Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor – sektor lainnya yang sangat berpotensi untuk memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih kokoh. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kementrian PUPR adalah salah satu yang ditugaskan untuk pembangunan infrastruktur salah satunya adalah jalan yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bina Marga dengan membentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), salah satunya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau merupakan salah satu dari 26 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengadaan maupun pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dibentuk untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan dan prasarana jalan dan jembatan yang handal dan guna mewujudkan program pemerintah saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dengan total panjang ruas jalan nasional di lingkungan BPJN Riau adalah 1336,61. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis di bidang penanganan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Dan Direktorat Jenderal Bina Marga).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta amanat yang diberikan kepada BPJN Riau, berpedoman pada Renstra BPJN Riau 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024 yang memuat target Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Penyelenggaraan Jalan Nasional Tahun 2022 yang harus dicapai oleh BPJN Riau.

Adapun kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau berada di Jl. Pepaya No. 63, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau memiliki Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) dibagi masing – masing wilayah, yaitu: Satker PJN wilayah 1 Riau dan Satker PJN wilayah 2 Riau. Satker PJN wilayah 1 Riau memiliki pejabat pembuat komitmen / PPK yaitu: PPK 1.1; PPK 1.2; PPK 1.3; dan PPK 1.4 sedangkan Satker PJN wilayah 2 Riau terdiri dari: PPK 2.1; PPK 2.2; PPK 2.3; PPK 2.4; dan PPK 2.5. Fungsi dari Satker PJN ini adalah pelaksana kegiatan pekerjaan jalan nasional sesuai dengan cakupan wilayah terbagi. Kantor Satker PJN wilayah 1 dan 2 Riau berada di Jl. Sekolah, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

Pada kegiatan Kerja Praktek, pekerjaan pelaksanaan rehabilitasi jalan nasional di PPK 1.2 dengan paket rehabilitasi jalan Sp. Batang – Sp. Kulim, Sp. Batang – Sp. Terminal, Batas Kota Dumai – Duri dilakukan oleh penyedia jasa kontraktor dari PT. Bangun Mitra Abadi dan diawasi oleh konsultan pengawas dari PT. Global Profex Synergy.





Gambar 1 Lokasi kantor BPJN Riau Sumber: Google Maps, 2022



Gambar 2 Lokasi kantor Satker PJN wilayah 1 dan 2 Riau Sumber : Google Maps, 2022

1.2 Tujuan Proyek

Adapun tujuan proyek rehabilitasi jalan ini adalah bertujuan untuk mengganti atau memperbaiki kondisi jalan yang rusak karena permukaan aspal di ruas jalan Soekarno Hatta, Kota Dumai ini sangat tidak rata dan bergelombang, maka kondisi aspal yang sudah rusak diganti dengan aspal CAP dari AMP dan di hamparkan di lokasi jalan yang rusak sehingga ruas jalan yang ada di jalan Soekarno Hatta tidak ada kerusakan.

Adapun target pelaksanaan rehabilitasi jalan Soekaro Hatta, Kota Dumai yaitu :

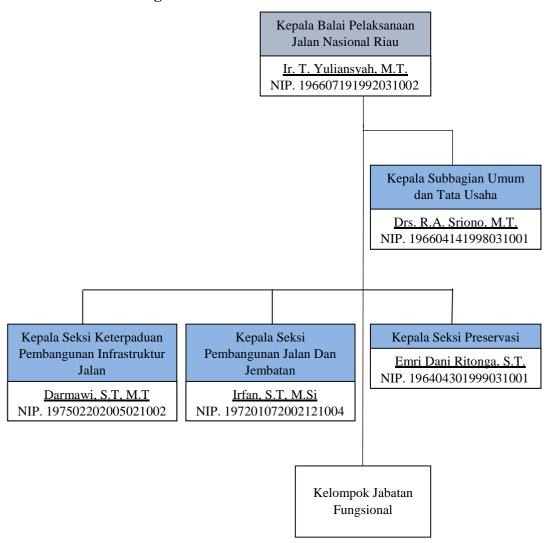
- a. Mempertahakan Kondisi Jalan agar dapat memberikan pelayanan jasa transportasi yang optimal.
- b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang mempengaruhi pengembangan ekonomi daerah melalui aktivitas aktivitas ekonomi dan dapat meningkatkan iklim investasi .
- c. Membuat rasa aman bagi pengendara lalu lintas ketika melintasi jalan tersebut.
- d. Menargetkan pembelian material dan penyewaan alat berat yang efisien dan ekonomis sesuai dengan spesifikasi teknis.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam suatu organisasi, badan usaha ataupun instansi membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan

dikoordinasikan. Adapun struktur organisasi yang berkaitan dengan rehabilitasi jalan Soekarno Hatta, Kota Dumai, yaitu :

• Struktur Organisasi Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Riau



Gambar 3 Struktur Organisasi BPJN Riau Sumber : LAKIP BPJN RIAU 2021

Struktur organisasi BPJN Riau terdiri atas:

1) Subbagian Umum dan Tata Usaha

Mempunyai tugas pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum, pelaksanaan komunikasi publik di Balai, pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan

perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Kepala Subbagian Tata Usaha dijabat oleh Drs. R.A. Sriono, MT.

2) Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan, penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan program pengadaan lahan jalan nasional. Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Insfrastruktur Jalan dijabat oleh Darmawani, ST. MT

3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan . Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dijabat oleh Irfan, ST. M.Si .

4) Seksi Preservasi

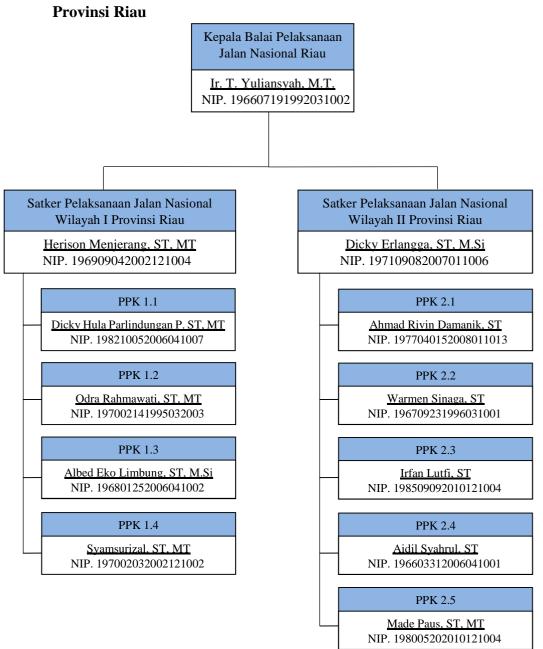
Mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya,

pengawasan penerapan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan . Kepala Seksi Preservasi dijabat oleh Emri Dani Ritonga, ST.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing seksi secara hierarki bertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban dalam organisasi

Struktur Organisasi Organisasi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinci Piov



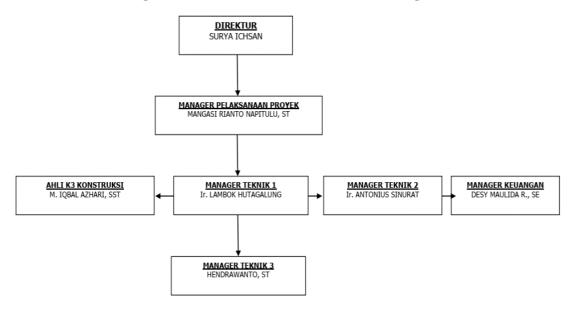
Gambar 4 Struktur Organisasi Satker PJN I Riau (Penanganan Jl. Soekarno Hatta, Kota Dumai)

Sumber: LAKIP BPJN RIAU 2021

Tugas dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yaitu:

Mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan pengadaan; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan Harga Perkiraan Satuan (HPS); menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli; melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; mengendalikan kontrak; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja penyedia.

• Struktur Organisasi Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Mitra Abadi



Gambar 5 Struktur Organisasi PT. Bangun Mitra Abadi Sumber : PT. Bangun Mitra Abadi, 2022

Adapun Struktur Organisasi PT. BANGUN MITRA ABADI adalah sebagai berikut:

a) Direktur

Mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu : bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengerahkan system-sistem prosedur, *policy* rencana serta program dalam divisi konstruksi; dan bertanggung jawab atas tercapainya target yang telah ditentukan perusahaan dalam bidang konstruksi.

Selain itu direktur dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban dan wewenang, yaitu:

- a) Mempersiapkan, mengkoordinasi, merencanakan, memonitor dan mengendalikan semua kegiatan-kegiatan dalam bidang konstruksi.
- b) Menjaga dan mengatur agar pelaksanaan konstruksi yang menyangkut pada jadwal pelaksanaan proyek maupun masalah biaya yang timbul dilapangan maupun di pusat.
- c) Membuat evaluasi prestasi yang dihasilkan oleh divisi konstruksi serta memberikan pengarahan dan koordinasi yang baik disemua jajaran divisi konstruksi.
- d) Menetapkan rencana dan prosedur kerja serta menentukan struktur organisasi proyek yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan untuk mencapai target perusahaan.
- e) Menjaga dan mengontrol administrasi konstruksi.

b) Manager Proyek

Mempunyai tugas yaitu: mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini; melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen, dll.) dan keluar; dibantu semua coordinator menyiapkan rencana kerja operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek; melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana; mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dan tertulis (laporan kemajuan pekerjaan); menyesuaikan proyek yang ditangani sesuai dengan biaya, spesifikasi dan waktu.

c) Manajer Teknik

Mempunyai tugas yaitu : mengontrol pekerjaan dilapangan dengan baik agar dapat mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan (biaya, mutu, waktu, keselamatan); melakukan perencanaan sasaran dan mengontrol program kerja (memahami dokumen kontrak, *shop drawing, construction*, konsep dan gambar perencanaan serta *approval* material); membuat perncanaan proyek, membuat laporan kerja dan melakukan evaluasi hasil pekerjaan untuk dilaporkan nantinya ke kantor pusat; memberikan saran kepada manajemen atas resiko yang dapat memengaruhi serta berhubungan dengan klien untuk mengembangkan dan memberian *future plan* perusahaan; melakukan pemantauan proges proyek, produktivitas pekerja dan kepatuhan terhadap kode keselamatan kerja; dan memberikan arahan, motivasi dan memberikan pelatihan kepada bawahannya tentang disiplin kerja.

d) Ahli K3 proyek

Ahli K3 Konstruksi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam identifikasi, evaluasi, pengendalian risiko, serta kesehatan dan keselamatan kerja dan memastikan semua kondisi sumber daya dalam keadaan baik dan selamat. Ahli K3 juga bertugas untuk memonitor pekerjaan lapangan yang membutuhkan pengawasan lebih detail. Tugas dan tanggung jawab Ahli K3 antara lain:

- Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi.
- 2. Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- 3. Merencanakan dan menyusun program K3
- 4. Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
- Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
- 6. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi
- 7. Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan

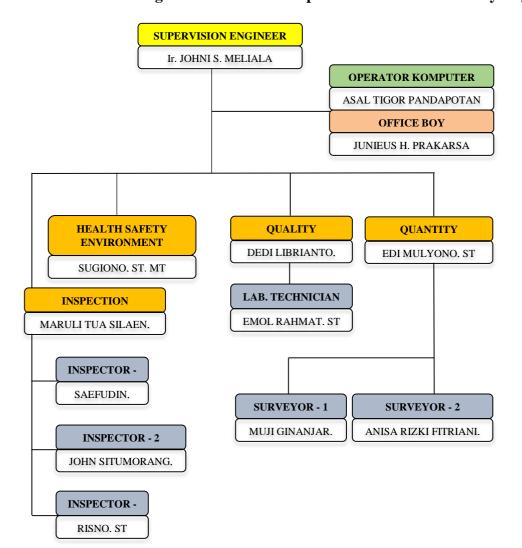
8. Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

Pada Proyek Presevasi Rehabilitasi Jalan Sp. Batang – Sp. Kulim, Sp. Batang – Sp. Terminal Dan Bts. Kota Dumai –Duri (Myc), Ahli K3 dijabat oleh M.Iqbal. Azhari, SST.

e) Ahli K3 proyek

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu: menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan; bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengadaan, administrasi dan keuangan proyek; melakukan pencatatan atas semua transaksi dan pembayaran; mengurus hal-hal yang terkait SDM termasuk pembayaran BPJS dan perpajakan; mengelola tim administrasi dan keuangan agar dapat mendukung berjalannya kegiatan; memastikan proses administrasi berjalan sesuai SOP; bekerja sama dengan tim keseluruhan proyek dan pihak eksternal; dan membuat laporan keuangan dan laporan pajak yang dibutuhkan proyek.

• Struktur Organisasi Konsultan Supervisi PT Global Profex Synergy



Gambar 6 Struktur Organisasi Konsultan Supervisi Sumber : PT Global Profex Synergy, 2022

1. Supervision Engineer

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Pelaksana dan menyampaikan laporan kepada PPK; mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi secara teratur; memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi; membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak pekerjaan dan material; memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat; memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh *Quantity Engineer*; dan memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar - gambar kerja dan analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Pelaksana sebelum pelaksanaan.

2. Operator Komputer

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : membantu dalam membuat laporan-laporan dan memasukkan data-data serta bertanggung jawab atas kebenaran dan ketelitian pemasukkan data.

3. *Office Boy*

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : membantu dalam memenuhi semua kebutuhan teknis karyawan di kantor dengan baik; menjaga kebersihan ruang kerja karyawan, peralatan kantor, dan lingkungan perusahaan; dan melakukan tugas yang dibebankan dapat terlaksana dengan baik.

4. Health Safety Environment (HSE/K31)

Mempunyai tugas yaitu : melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja; membuat suatu

gagasan yang berkaitan dengan program K3 seperti usaha pencegahan (preventif) dengan tujuan mengurangi resiko bahaya atau kecelakaan kerja; membuat dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan K3; dan melakukan evaluasi kemungkinan atau peluang insiden kecelakaan yang dapat terjadi.

5. Inspection Engineer

Mempunyai tugas yaitu : mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak; melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa dan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan kontraktor; mengawasi dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis; dan membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan, terdiri dari cuaca, material yang dating, perubahan dan bentuk dan ukuran pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan.

6. Lab.Technician

Mempunyai tugas yaitu : membantu *Quality Engineer* dalam pengendalian mutu dan verifikasi data mutu pekerjaan dilapangan.

7. Inspector

Mempunyai tugas yaitu : membantu *Inspection Engineer* dalam pengawasan dan keluaran hasil pekerjaan konstruksi, dan melakukan inspeksi pengawasan pekerjaan di lapangan dan verifikasi pemenuhan tingkat layanan jalan.

8. Surveyor

Surveyor adalah seorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati pekerjaan . Mempunyai tugas yaitu : membantu *Quantity Engineer* dalam pengawasan dan pengukuran pekerjaan dilapangan.

- a. Bertanggung jawab mengawasi survey lapangan yang dilakukan kontraktor untuk memastikan pengukuran dilaksanakan dengan prosedur yang benar .
- b. Menentukan lokasi yang tepat dari fitur penting di area survey menggunakan peralatan khusus.
- c. Menjamin data yang diperoleh akurat sesuai dengan kondisi lapangan untuk keperluan peninjauan desain atau detai desain.

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

PT. Bangun Mitra Abadi adalah perusahaan perencanaan pelaksanaan kontruksi berbentuk PT. PT. Bangun Mitra Abadi beralamat di Jl.Karya Kasih Gg.ABRI No 58-L Kel.Pangkalan Masyhur Kec.Medan Johor Kabupaten Kota Medan .

PT. Bangun Mitra Abadi adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek nasional. PT. Bangun Mitra Abadi saat ini memiliki kualifikasi . PT. Bangun Mitra Abadi dapat mengerjakan proyek-proyek dengan sub klasifikasi:

Tabel 1 Sub klasifikasi

No	Sub Kualifikasi	Jenis Pekerjaan
1	MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Intalasi
		Perpipaan,Gas,Enenrgi (Pekerjaan Rekayasa)
2	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran air,Pelabuhan
		,Dam,dan Prasarana Sumber daya air lainnya
3	SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan raya (kecuali jalan
		layang),Jalan rel kereta api ,dan Landas Pacu Bandara
4	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi pekerjaan Jembatan, Jalan
		Layang, Terowongan dan Subways
5	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan
6	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung